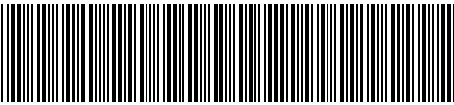




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.539138/2025**



DS:0760-5700-4758-4908

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
- 3. Provinsi : (25) PAPUA
- 4. Kode>Nama Satker : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
- Sebesar : Rp. 7.328.702.000 (TUJUH MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	7.328.702.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 7.328.702.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

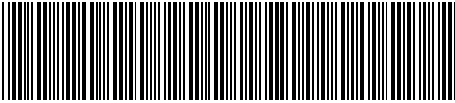
ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.01.2.539138/2025

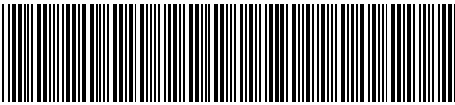


DS:0760-5700-4758-4908

Satker : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	7.328.702.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	1.690.003.000
WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	5.638.699.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.539138/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0760-5700-4758-4908

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

								Halaman : I A. 1
Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen					7.328.702.000
Kegiatan	:	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					1.690.003.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,00	Unit, m2, Paket		1.690.003.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		393.635.000
			02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit		1.296.368.000
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama					5.638.699.000
	:							
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5.638.399.000
Rincian Output		:	01	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Laporan		700.000
			02	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		5.637.699.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		300.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen		300.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.539138/2025
I B. SUMBER DANA

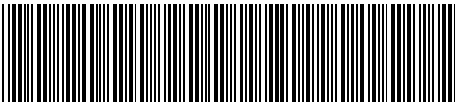


Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	7.328.702.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	7.328.702.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
(dalam ribuan rupiah)								

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.539138/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0760-5700-4758-4908

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

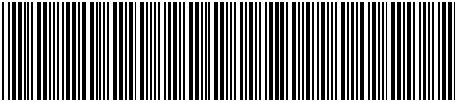
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	3.678.479	1.960.220	1.690.003	-	-	7.328.702	25 . 51 063@ 25 . 51 063@ 25 . 51 063@	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.678.479	1.960.220	1.690.003	-	-	7.328.702		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	1.690.003	-	-	1.690.003		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	-	1.690.003	-	-	1.690.003		
01	RM	-	-	1.690.003	-	-	1.690.003		
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	3.678.479	1.960.220	-	-	-	5.638.699		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	3.678.479	1.959.920	-	-	-	5.638.399		
01	RM	3.678.479	1.959.920	-	-	-	5.638.399		
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	300	-	-	-	300		
01	RM	-	300	-	-	-	300		
JUMLAH		3.678.479	1.960.220	1.690.003	-	-	7.328.702		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.539138/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0760-5700-4758-4908

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (25) PAPUA
Kode/Nama Satker : (539138) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

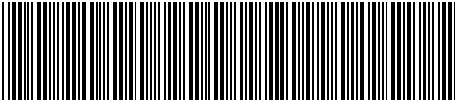
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	298.976	428.195	653.271	374.320	404.204	1.948.434	420.504	381.886	360.548	405.194	413.187	1.239.981	7.328.702
		BELANJA PEGAWAI	254.535	254.535	512.601	254.535	254.535	512.601	254.535	254.535	254.535	254.535	254.535	362.464	3.678.479
		BELANJA BARANG	11.639	140.858	107.868	86.983	116.867	106.663	133.167	94.550	73.212	117.857	125.850	844.705	1.960.220
		BELANJA MODAL	32.802	32.802	32.802	32.802	32.802	1.329.170	32.802	32.802	32.802	32.802	32.802	32.813	1.690.003
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	32.802	32.802	32.802	32.802	32.802	1.329.170	32.802	32.802	32.802	32.802	32.802	32.813	1.690.003
		53 BELANJA MODAL	32.802	32.802	32.802	32.802	32.802	1.329.170	32.802	32.802	32.802	32.802	32.802	32.813	1.690.003
		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	266.174	395.393	620.469	341.518	371.402	619.264	387.702	349.084	327.746	372.392	380.385	1.207.168	5.638.699
		51 BELANJA PEGAWAI	254.535	254.535	512.601	254.535	254.535	512.601	254.535	254.535	254.535	254.535	254.535	362.464	3.678.479
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	11.639	140.858	107.868	86.983	116.867	106.663	133.167	94.550	73.212	117.857	125.850	844.705	1.960.220
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.153	25.825
		- PNBP (425131)	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.153	25.825

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.539138/2025
IV A. B L O K I R



DS:0760-5700-4758-4908

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539138] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

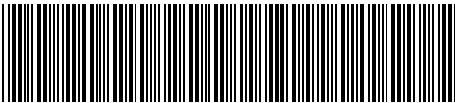
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA		Efisiensi Anggaran
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.389.098	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 798.995	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	53 Belanja Modal Rp. 1.590.103		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.325
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		Efisiensi Anggaran
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 498.636
	Catatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat 1 Unit		Efisiensi Anggaran
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 393.635	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	RKBMN	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)		Efisiensi Anggaran
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.196.468	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Efisiensi Anggaran	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.540
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.654		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.720
	Efisiensi Anggaran		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)	6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 63.120	521211	Belanja Bahan(RM)
	Efisiensi Anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Anggaran
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 700		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.539138/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0760-5700-4758-4908

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539138] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 393.635		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Roda Empat 1 Unit Rp. 393.635		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001